



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN POTENSI PRODUK DOMESTIK PROGRAM GERAJ MARITIM DAN UMKM

\*Karjono, Karmanis, Evyana Diah Kusumawati

Politeknik Bumi Akpelni Semarang,

\*E-mail : karjono@akpelni.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep *good governance* yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik, Pemahaman kompetensi dan komitmen pemahaman pemasaran produk Domestik masih rendah dan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk Domestik yang kurang mendukung. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku industri UMKM dan 250 responden. Pengumpulan data dengan metode kuesioner melalui google form dan wawancara langsung, Uji coba instrumen ini dilakukan terhadap 50 pelaku industri wilayah 3 tp. Metodologi yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi (pengamatan), studi pustaka dan *interview* (wawancara). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan bentuk metode deskriptif kualitatif. Hasil pengamatan yang didapat adalah kemampuan pelaksanaan pelayanan publik dalam menjalankan dan melayani untuk memberikan pelayanan membantu masyarakat sesuai yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya serta kehaandalan pegawai dalam memberikan pelayanan sangat membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan, akurat dan sesuai harapan. Yang ketiga Dimensi Responsiveness (Ketanggapan).

**Kata Kunci** : Pelayanan publik, Good governance, produk domestik..

### Abstract

*This study aims to determine the existence of public policy uncertainty in the concept of good governance which can be a source of non-compliance by people to law or public policy, understanding of competence and commitment to understanding the marketing of domestic products is still low and the facilities and infrastructure in increasing the marketing potential of domestic products are less supportive. The population in this study were MSME industry players and 250 respondents. Data collection was carried out using the questionnaire method via Google form and direct interviews. The test of this instrument was carried out on 50 industrial players in the 3 tp area. The methodology used uses a qualitative approach where data collection techniques use observation techniques (observations), literature studies and interviews (interviews). Analysis of the data used is to use a form of qualitative descriptive method. The observation results obtained are the ability to implement public services in carrying out and serving to provide services to help the community according to what is promised in an appropriate and reliable manner and the reliability of employees in providing services greatly assists the community in providing the promised services, accurately and as expected. The third dimension is Responsiveness (responsiveness).*

*Keywords: Public service, Good governance, domestic product.*

## 1. PENDAHULUAN

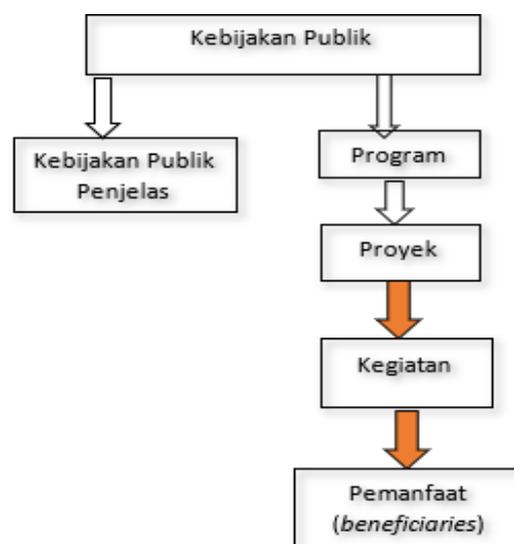
Implementasi kebijakan Publik dengan konsep *good governance* merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik dan merupakan wujud dari implementasi peraturan atau tata kelola untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan dari berbagai pihak dalam urusan bisnis maritim khususnya mapupun pelayanan



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

publik. Pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan [1] sebgas apapun produk kebijakan tidak akan mempunyai peran atau nilai tanpa action dan Implementasi Oleh sebab itu, implementasi kebijakan adalah aspek penting atas keseluruhan proses kebijakan dapat menggambarkan adanya keterkaitan perumusan dan implementasi kebijakan. Banyak pendekatan dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelebagaan *good governance* [2]. UNDP mendekatinya dengan prinsip-prinsip, yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip *good governance*. UNDP mengemukakan sembilan prinsip, yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. *Good governance* memiliki 12 prinsip, yang apabila dikaitkan dengan bentang institusi *governance* akan membentuk sebuah *multiple governance* [3]. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Proses pembuatan kebijakan publik malalui empat (4) tahapan yaitu: (1) Tahap Perumusan: dimulai dari penetapan rumusan masalah sampai pemilihan alternative masalahnya, untuk rekomendasi dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. (2) Implementasi kebijakan publik ada tiga bentuk yaitu implementasi kebijakan publik secara langsung, secara tidak langsung dan yang bersifat campuran. (3) Monitoring kebijakan publik merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, untuk melihat seberapa jauh tujuan itu tercapai (4). Evaluasi, bertujuan untuk dapat menilai perbandingan dan perbedaan sebelum dan sesudah implementasi.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji [4] yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang bisa diambil, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut [5]. Secara umum dua pilihan langkah tersebut dapat digambarkan berikut:



Gambar 1. Flowchart sekuensi implementasi kebijakan



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster serta Mazmanian dan Sebatier diatas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Pelaksanaan aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan prinsip *Good governance* di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik [6]. Pentingnya pengukuran sektor publik yang terdiri dari tiga pengukuran yaitu [7]: a). Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan, b). Sebagai pembelajaran memperbaiki praktek manajemen, dan c). Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Untuk menerapkan praktik *good governance* maka dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Secara teoritis *good governance* mengandung arti bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat [8]. Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan. Kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip *good governance* dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaannya terhadap kinerja pegawai, bahwa disetiap kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 3 Mewujudkan *good governance* tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi pemerintah yang mencirikan praktik *good governance*, dan *good governance* sangat memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan terhadap praktik *good governance*, dan pengembangan *good governance* akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Peran manajemen stratejik sektor publik menuju *good governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen stratejik sektor publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai *good governance*. Manajemen stratejik sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik untuk melakukan perencanaan manajemen dengan mempertimbangkan dengan baik faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam organisasi public [9].

Pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja organisasi. Penelitian tersebut bertujuan menguji sejauh mana implikasi pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang diukur dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas [10]. Dalam sebuah penelitian, penerapan transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan kemampuan dalam menyediakan informasi yang belum sepenuhnya memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, kemempuasan dalam menyediakan akses pada informasi yang belum sepenuhnya mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh publik [11]. Fungsi Birokrasi sampai sekarang terutama di pemerintah daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada umumnya Masyarakat mengidentifikasi birokrasi sebagai proses berbelit-belit, lama, masih dengan mengeuarkan biaya yang besar dan pada akhirnya masih menimbulkan keluh kesah bahwa birokrasi masih berpihak pada koneksi, tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang mempunyai etos kerja rendah tersebut menjadi sumber peneliti melakukan pengamatan dalam judul penelitian Implementasi kebijakan publik dengan konsep *good governance* dalam meningkatkan pemasaran potensi produk domestik program gerai Maritim dan UMKM. Tujuan penelitian ini adalah membahas dan mengetahui (1) Adanya ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep *good governance* yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.(2). Pemahaman kompetensi dan komitmen pemahaman pemasaran produk



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Domestik masih rendah (3) Sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk Domestik yang kurang mendukung.

## 2. METODE

Metode Penelitian pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti [12] Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti berusaha mengkaji Implementasi kebijakan publik dengan konsep good governance dalam meningkatkan pemasaran potensi produk domestik program gerai Maritim dan UMKM. yang terbatas pada upaya mendeskripsikan keadaan atau kondisi Good Governance yang ada, dengan uraian secara deskriptif. Bertolak dari uraian tersebut maka peneliti memilih pendekatan melalui kuisiuner dengan Google form dan wawancara secara langsung pelaku UMKM pengelolaan hasil tangkap Ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten Batang dan Jawa tengah dan observasi dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 1. Subyek Penelitian

Dalam subyek penelitian ini, populasi targetnya adalah para pelaku usaha UMKM pengelola hasil tangkap ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten Batang dan Jawa Tengah.

### 2. Teknik pengumpulan data.

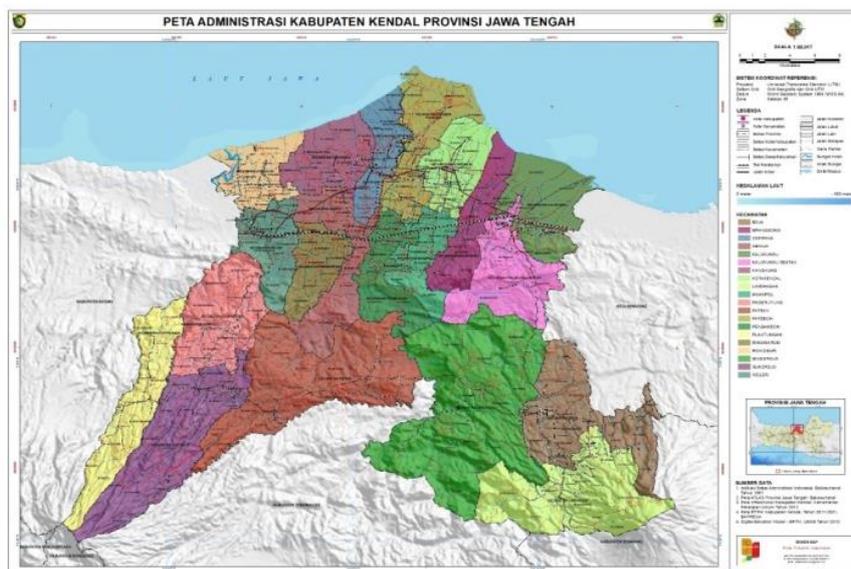
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan), studi pustaka dan interview (wawancara)

### 3. Analisis Data

Dalam analisis data yakni data setelah terkumpul semua, langkah yang dilakukan selanjutnya melakukan pengolahan dan analisa data. Analisis data disini menggunakan bentuk metode deskriptif kualitatif. Dimana dengan metode deskriptif ini suatu metode dalam membuat gambaran secara sistematis tentang hubungan fenomena yang diselidiki, hasilnya tidak dinyatakan dengan angka dan tidak pula untuk menguji hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kendal dan masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsapur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat.



Gambar 2. Peta Kota Kendal



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Kondisi geografis Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' – 110°18' Bujur Timur dan 6°32' – 7°24' Lintang Selatan dan topografis Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl dan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 – 2.579 meter dpl.

### **3.1. Adanya ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep good governance yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik**

Dengan adanya ketidakpastian tersebut menjadikan beberapa mekanisme tatakelola yang seharusnya sudah muncul kebijakan-kebijakan berkembang lebih maju dari berbagai sektor, masyarakat umum dan pelaku UMKM banyak mengeluhkan layanan Publik dan selalu dikaitkan *action* layanan. untuk mencapai perubahan penting dalam masyarakat yang harusnya dilayani dalam kondisi Prima. dari data hasil peneliti masyarakat mengisyaratkan bahwa pelayan sektor Publik dalam konsep *Good Governance* harus merubah mindset untuk melihat dan menyikapi layanan yang sudah diberikan, Bahwa Hidup bermasyarakat kekuasaan dan otoritas tidak lagi terpusat pada pemerintahan, Warga negara juga mempunyai otoritas dan kekuasaan yang harus diayani dengan Baik. Saya melihat ini sebagai hal penting untuk menunjukkan bahwa jalan untuk memperbaiki penilaian masyarakat ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep *good goevernance* belum terlaksana sesuai aturan. konsep good goevernance bisa berjalan dengan Baik apabila bisa memahami aktor Publik dan warga negara mempunyai kepentingan bersama. ini membutuhkan serangkaian kebijakan yang sinergis, antar sektor masih ada keterkaitan. Contoh sektor kesehatan dan sektor bisnis yang berada di luar sektor pemerintahan membutuhkan dukungan oleh struktur dan mekanisme yang bisa berkolaborasi, ini yang bisa menjadikan legitimasi yang kuat untuk membantu menjangkau dan melakukan peran baru dalam membentuk kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sampai saat ini banyak diskusi tentang konsep *Good Governance* dalam semua kebijakan tindakan lintas sektoral untuk memulai prespektif kebijakan publik dalam konsep good goevernance didasarkan pada bukti-bukti bahwa faktor penentu yang harus dilakukan untuk memperbaiki sektor Publik dalam konsep konsep *Good Governance*.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau apa yang menjadi sebab Adanya ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep good governance yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. Upaya reformasi birokrasi sudah dilakukan tetapi dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Belum terlaksana sesuai aturan menyebabkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum atau birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, dan harus memiliki semangat sebagai pelayan publik. Peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. ketiga nya mempunyai peran masing-masing (legiskatif, eksekutif, yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam pendiptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik. dari permasalahan pertama ini bisa disimpulkan bahwa : berbasis pengetahuan dan *mindset* ketiga unsur harus menanamkan perubahan untuk lebih baik atau perubahan konsektual, adanya saling ketergantungan, kompleksitas, berbenah bersama.

### **3.2 Pemahaman kompetensi dan pemasaran produk Domestik masih rendah**

Pemahaman kompetensi dan pemasaran produk Domestik adalah cara yang paling ampuh untuk menang dalam perdagangan Global menunggulkan produk Domestik. Pelaku UMKM wajib memikirkan kembali kompetensi yang mencakup pembelajaran kolektif, Integrasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, dan komitmen untuk produk Domestik lebih unggul. Dalam beberapa tahun ini, variasi kompetensi inti telah muncul dengan fokus pada Individu. Ide yang menunjukkan bahwa pelaku usaha atau pencari kerja harus menunjukkan kompetensi agar menang di pasar. antara lain kemampuan analitis, komunikasi, penyelesaian serta pengambilan keputusan masalah, ketrampilan interpersonal dalam membangun usaha. Peran sumber daya Manusia dalam suatu Organisasi merupakan penentu utama kompetensi dalam meningkatkan produk, peran organisasi sebagai hal yang mempengaruhi atau sebagai manajemen pegawai.

Permasalahan teridentifikasi bahwa (1) pemahaman kompetensi pemasaran didominasi usia 19-32 tahun. Hal ini pelaku industri UMKM yang memahami strategi pemasaran produk domestik hasil olahan ikan secara *on-line*. pada usia 32 tahun ke atas hal yang dapat mempengaruhi pemahaman kompetensi dan komitmen



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pemahaman pemasaran produk Domestik masih rendah antara lain (1) kompetensi lingkungan kerja masih rendah terlihat latar belakang pendidikan masih tertinggal, (2) komitmen Organisasi masih ada pegawai datang terlambat, tidak hadir tanpa keterangan dan kebiasaan pulang sebelum waktu yang ditentukan, (3) Kinerja pegawai yang terlambat dalam menyelesaikan target pekerjaan dan cenderung menunda. Terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi dan merupakan indikator dari kompetensi pegawai, yaitu: 1. Motif (*motive*) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. 2. Sifat (*traits*) adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau informasi. 3. Konsep diri (*Self ± Concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kompetensi yang kompleks. 5. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental [13]. Menurut Spencer and Spencer, konsep diri (*self- concept*), watak/sifat (*traits*) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (*hidden*), dalam (*deeper*) dan berbeda pada titik sentral keperibadian seseorang [14]. Kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab akibat yang menunjukkan bahwa tujuan, perilaku, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan yang kemudian memprakirakan kinerja kompetensi mencakup niat, tindakan dan hasil akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil yang maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya perilaku kewiraswastaan, penentuan tujuan, bertanggung jawab atas hasil akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan.

Dalam permasalahan ini strategi pemasaran untuk olahan produk masih bersifat tradisional oleh sebagian besar pelaku UMKM, peran sektor Publik sangat digarapkan sebagai pemicu bangkitnya produk Domestik, logikanya jika di rumah sendiri sudah tidak kompetitif bagaimana bisa unggul di produk global. Peran pemerintah bisa memberikan pelatihan dengan sekaligus strategi pemasaran yang baik, dimudahkan dalam pelayanan publik seperti perijinan, permodalan, dll. Sebagai simpulan analisis permasalahan diatas adalah pendekatan strategi pemasaran produk domestik yaitu penggabungan antara *adaption of marketing strategies and marketing strategy*.

### 3.3. Sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk

Pergeseran dalam persaingan global telah mendorong semua produk domestik dipaksakan menuju pasar global. Pelaku industri dan UMKM yang tidak berhasil beradaptasi akan tersingkir dengan sendirinya. Sekarang sudah terjadi banyak produk Global menguasai pasar domestik. Restoran cepat saji contoh McDonalds, KFC. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan di Negara kita. Tugas sektor pelayanan Publik harus ditingkatkan lagi, kemampuan mereka dalam mengemas layanan, pelaku industri dalam mengemas strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Implementasi kebijakan Publik dengan konsep *good governance* merupakan suatu tahapan utama dalam layanan publik, sarana dan prasarana yang masih belum menunjang meningkatkan pasar potensi domestik, data peneliti yang didapat bahwa kurangnya sarana dan prasarana seperti pelabuhan sandar untuk kapal nelayan, biaya transportasi masih tinggi, akhirnya hasil tangkap atau hasil panen ikan dikuasai oleh pemain usaha menengah keatas. terbatasnya kemampuan sarana dalam menyimpan, mengelola. Memasarkan secara politik, ekonomi, sosio-budaya, geografis, dan teknologi. Kondisi pasar memiliki ciri tersendiri dibanding negara lain, hal ini kemungkinan besar menjadikan disparitas harga sangat dominan. Permasalahan utama bagi Indonesia sebagai negara archipelago adalah perbedaan harga komoditas pangan yang sangat menonjol antara daerah konsumsi dengan daerah produksi atau antara daerah pelosok dengan pusat kota (perdagangan). Persoalan ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, perbedaan muatan kargo (tidak dimanfaatkan secara optimal) sehingga biaya per unit produk menjadi lebih mahal, tidak efisiennya rantai pasok komoditas pangan, serta banyaknya perlakuan terhadap produk yang diperlukan selama distribusi. Penerapan konsep Tol Laut ini, diharapkan sistem distribusi produk pangan akan lebih optimal dan dapat menghemat biaya logistik hingga 3,8%. Artinya, permintaan masyarakat di setiap penjuru wilayah dapat terpenuhi dengan adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang dapat diakses oleh kapal-kapal perintis kemudian disalurkan melalui jalur darat. Sedangkan penghematan biaya logistik dapat tercapai hanya bila diimbangi dengan penyesuaian daya produksi tiap wilayah agar setiap return cargo yang kembali ke pelabuhan asal dapat terisi penuh [15]. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan untuk menunjang kesuksesan pemberlakuan Tol Laut ini sehingga dapat menjamin keberlanjutan rantai pasok komoditas pangan, beberapa diantaranya: Peningkatan dan pemerataan daya produksi di tiap wilayah agar pemenuhan return cargo dapat tercapai. Oleh karena itu



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

seorang agroindustrialist dituntut untuk dapat melakukan intensifikasi produksi komoditas pangan dan melakukan inovasi pemanfaatan produk lokal. Pembangunan infrastruktur penunjang baik selama transportasi ataupun di pelabuhan, seperti adanya sistem pendingin yang digunakan untuk mengangkut produk pertanian segar, gudang di pelabuhan untuk menampung produk yang belum siap angkut, dan infrastruktur penunjang lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Belum terlaksana sesuai aturan menyebabkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum atau birokrasi sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, harus memiliki semangat sebagai pelayan publik dalam pelaksanaan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. ketiganya mempunyai peran masing-masing (legislatif, eksekutif, yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Kemampuan analitis, komunikasi, penyelesaian serta pengambilan keputusan masalah, ketrampilan interpersonal dalam membangun usaha merupakan potensi sumber daya manusia dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan sekitar dan global sehingga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan perusahaan harus mendapat perhatian yang progresif mengikuti tuntutan potensial melalui pelatihan teknis dan manajemen produksi komersial, perluasan pasar, pengembangan network, serta memiliki jiwa inovatif, mandiri dan berdaya saing. Bahwa dengan adanya peningkatan wawasan keterampilan UMKM dibidang pengelolaan ikan hasil tangkap dengan system pendukung keputusan memahami *strategy customer segment*, perencanaan bisnis dan pengembangan produk serta desain produk bagi perkembangan bisnis dan pemasaran produk melalui *marketplace* dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Diakhir tulisan ini, perkenankan penulis mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada para pelaku usaha UMKM pengelola hasil tangkap ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah yang tak terhingga sehingga pelaksanaan penelitian ini bisa dilaksanakan sesuai harapan tanpa ada suatu halangan apapun. Disamping itu penulis juga sangat menghaturkan ucapan terima kasih atas bantuan berbagai pihak yang terlibat dan ikut serta menyumbangkan sebuah pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mampu mempercepat serta membantu mensukseskan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Rindani, U. Maritim, R. Ali, K. Ismail, U. Maritim, dan R. Ali, "Perkembangan kebijakan pembangunan kelautan perikanan," no. May, 2021.
- [2] A. Mukti, M. Mahdum, dan G. Gimin, "Implementasi Penggunaan Aplikasi Alpeka Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sd Negeri Se-Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru," *J. Manaj. Pendidik. Penelit. Kualitatif*, vol. 5, no. 1, hal. 17, 2021, doi: 10.31258/jmppk.5.1.p.17-21.
- [3] L. Palangda dan J. M. Dame, "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik," *PUBLIC POLICY (Jurnal Apl. Kebijak. Publik Bisnis)*, vol. 1, no. 2, hal. 273–287, 2020, doi: 10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287.
- [4] Agustino, *Politik & kebijakan publik*. Bandung.
- [5] Nugroho, *Public policy*. Jakarta.
- [6] F. Kempa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura)," *J. Aktor*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [7] Harun, *Reformasi akuntansi dan manajemen sektor publik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- [8] V. Destriyani, "The effect of Good Governance, the Quality of Human Resources, and Information Technology Utilization Internal Control Performance Against Local Government Organisation (Studies in Regional Working Unit Kepulauan Meranti Government)," *Fekon*, vol. 2, hal. 1–15, 2015.
- [9] Icut Rangga Bawono, "Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance.," *Dosen Fak. Ekon. UNSOED Purwokerto*, 2007.



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [10] B. Mulyawan, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang,” 2009.
- [11] A. Mathematics, “濟無No Title No Title No Title,” hal. 1–23, 2016.
- [12] M. . Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- [13] S. F. Prihadi, *Assessment centre : identifikasi, pengukuran dan pengembangan kompetensi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [14] A. Darma, *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis bagi para Supervisor*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2003, 2003.
- [15] E. D. K. Karjono, Karmanis, “Laut, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Antarmoda Transportasi Dengan Konsep Good Governancedalam Mendukung Program Tol,” *Maj. Ilm. Gema Marit.*, vol. 24, no. 2, hal. 154–165, 2022, doi: <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i2>.

